

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desentralisasi fiskal di Indonesia mulai diterapkan secara luas setelah reformasi 1998 melalui kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan pembangunan. Kebijakan ini secara yuridis diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, mempercepat pemerataan pembangunan, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.

APBD berfungsi sebagai instrumen utama dalam pembiayaan program pembangunan daerah yang mencerminkan prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat (Putra et al., 2024). Kemandirian fiskal daerah menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan desentralisasi karena daerah yang mandiri mampu membiayai pengeluarannya melalui Pendapatan Asli Daerah tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat (Yusiawati & Marhaeni, 2020).

Ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat terlihat dari dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah. Data realisasi APBD nasional tahun 2023 pada Portal Data APBD DJPK Kementerian Keuangan

menunjukkan bahwa PAD sebesar Rp328,34 triliun atau sekitar 27–28% dari total pendapatan daerah, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp778,56 triliun atau sekitar 65% (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024). Perbedaan kapasitas fiskal antar daerah tampak dari kontribusi PAD, di mana data APBD DKI Jakarta 2023 DJPK mencatat PAD lebih dari 70% terhadap total pendapatan daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024). Sementara data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota BPS 2022–2023 menunjukkan beberapa daerah di Indonesia timur memiliki kontribusi PAD di bawah 15% (Badan Pusat Statistik, 2024).

Kondisi ini menyebabkan sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menutupi kebutuhan belanja pemerintah karena PAD saja tidak cukup membiayai seluruh belanja daerah. Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat ini menimbulkan risiko rendahnya kemandirian fiskal karena kemampuan daerah dalam menentukan prioritas pembangunan secara otonom menjadi terbatas. Rendahnya proporsi PAD dan dominasi dana transfer mencerminkan adanya permasalahan rendahnya kemandirian fiskal di banyak daerah di Indonesia.

Kemandirian fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan belanja dan pembangunan daerah dengan mengandalkan sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Para ahli mendefinisikan kemandirian fiskal sebagai tingkat kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Yusiawati & Marhaeni, 2020). Konsep ini menempatkan PAD sebagai komponen utama dalam menilai

kekuatan kapasitas fiskal suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskalnya. Dengan demikian, kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara otonom.

Kemandirian fiskal memiliki hubungan yang erat dengan keberhasilan pembangunan daerah karena kemampuan pembiayaan yang kuat memungkinkan pemerintah daerah menjalankan program pembangunan secara berkelanjutan. Daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi cenderung lebih leluasa dalam menentukan prioritas belanja sesuai kebutuhan masyarakat. Rendahnya PAD dapat membatasi kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang optimal, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat juga dapat memperlambat realisasi program apabila terjadi keterlambatan penyaluran anggaran. Peningkatan kemandirian fiskal menjadi kebutuhan strategis dalam mendorong pembangunan daerah yang efektif dan responsif.

Stabilitas fiskal daerah juga sangat penting dalam menghadapi situasi krisis, seperti pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi serta penerimaan daerah. Daerah dengan basis PAD yang kuat memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik karena dapat melakukan penyesuaian anggaran tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pendapatan yang sehat akan meningkatkan ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi guncangan ekonomi. Pemerintah daerah perlu memperkuat basis pendapatan melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan aset daerah secara produktif. Dengan penguatan basis pendapatan tersebut,

daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskal dan memperkuat kemandirian dalam jangka panjang.

Salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi kemandirian fiskal yaitu pendidikan. Menurut Todaro & Smith (2020), pendidikan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas manusia sehingga mampu berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan ekonomi. Mankiw (2021) menyatakan bahwa pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdampak pada produktivitas dan output ekonomi. Individu yang memperoleh pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki keterampilan dan kemampuan kerja yang lebih baik sehingga mampu menghasilkan output ekonomi yang lebih besar. Peningkatan produktivitas tersebut mendorong kenaikan pendapatan individu dan memperluas aktivitas ekonomi di suatu daerah (Yusiawati & Marhaeni, 2020). Aktivitas ekonomi yang meningkat akan memperluas basis pajak karena semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki kemampuan membayar pajak daerah. Pendidikan memiliki keterkaitan tidak langsung dengan peningkatan PAD melalui peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat (Sabono & Firmansyah, 2024).

Pendidikan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Tenaga kerja yang berkualitas akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena produktivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi meningkat (Yusiawati & Marhaeni, 2020). Pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat serta aktivitas usaha yang menjadi objek pajak dan retribusi daerah. Peningkatan penerimaan pajak daerah secara langsung berkontribusi terhadap kenaikan PAD dalam struktur pendapatan daerah

(Sabono & Firmansyah, 2024). Pendidikan berperan dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui mekanisme peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kapasitas penerimaan daerah.

Hal ini didukung oleh penelitian Astuti et al. (2026) yang menunjukkan bahwa komponen pendidikan dan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya lokal dapat berperan signifikan dalam penguatan kemandirian fiskal. Temuan yang kontras dengan penelitian tersebut juga ditemukan oleh Rahayu & Soleh (2017) yang menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara pendidikan atau belanja pendidikan dan tingkat kemandirian fiskal atau dampak langsung terhadap penerimaan daerah dalam konteks tertentu.

Faktor kedua yang diduga memengaruhi kemandirian fiskal adalah investasi. Investasi meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan modal fisik dan pengembangan kegiatan usaha. Mankiw (2021) menjelaskan bahwa akumulasi modal melalui investasi berperan dalam meningkatkan output dalam perekonomian. Todaro & Smith (2020) menyatakan bahwa investasi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja. Peningkatan output dan kesempatan kerja tersebut berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat serta memperluas aktivitas ekonomi di daerah.

Investasi juga berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan modal fisik dan pengembangan kegiatan ekonomi (Mankiw, 2021). Peningkatan kapasitas produksi tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena output barang dan jasa bertambah secara berkelanjutan (Todaro & Smith, 2020). Pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan memperluas basis pajak daerah karena semakin banyak pelaku usaha dan tenaga kerja yang memiliki

kemampuan membayar pajak. Aktivitas investasi juga meningkatkan transaksi ekonomi yang menjadi objek pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah (Mankiw, 2021). Peningkatan penerimaan pajak tersebut akan berdampak langsung pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBD (Halim, 2014). Kenaikan PAD akan memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai belanja pembangunan secara mandiri. Investasi berfungsi sebagai penggerak utama dalam meningkatkan penerimaan daerah dan mendukung terwujudnya kemandirian fiskal.

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yusiawati & Marhaeni (2020) yang menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah, di mana realisasi investasi berkontribusi pada peningkatan penerimaan daerah dan memperkuat kemampuan fiskal lokal melalui peningkatan PAD. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti et al. (2025) menunjukkan bahwa efek investasi terhadap kemandirian fiskal bersifat *mixed* atau tidak konsisten karena dipengaruhi oleh karakteristik daerah, struktur ekonomi, dan kualitas tata kelola fiskal lokal sehingga tidak selalu signifikan secara statistik di semua konteks regional.

Faktor terakhir pembentuk dari kemandirian fiskal yaitu infrastruktur. Infrastruktur merupakan bentuk *public capital* yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur transportasi dan konektivitas seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan berperan dalam memperlancar distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja antarwilayah. Teori *multiplier effect* yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes menjelaskan bahwa peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastruktur akan menimbulkan efek berganda terhadap pendapatan dan output ekonomi

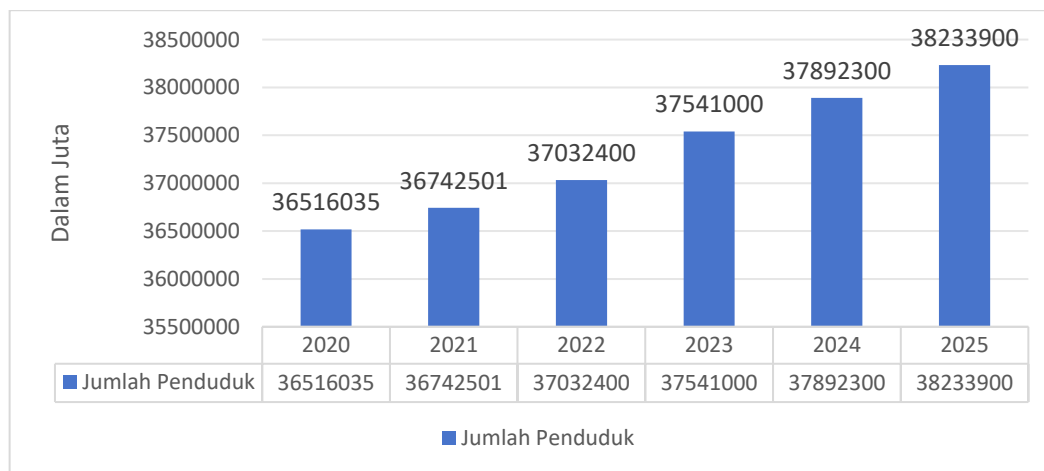
(Keynes, 2017). Infrastruktur yang memadai dapat menurunkan biaya produksi dan biaya transaksi karena akses distribusi menjadi lebih efisien (Mankiw, 2021). Penurunan biaya tersebut akan meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Todaro & Smith, 2020).

Pembangunan infrastruktur meningkatkan aktivitas ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Aktivitas ekonomi yang meningkat akan memperluas basis pajak daerah karena jumlah transaksi, usaha, dan pendapatan masyarakat bertambah. Peningkatan aktivitas tersebut akan mendorong kenaikan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Halim, 2014). Kenaikan PAD akan memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai belanja publik tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat. Infrastruktur berfungsi sebagai fondasi fiskal jangka panjang karena mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan memperbesar potensi penerimaan daerah secara berkelanjutan.

Hubungan antara pembangunan infrastruktur terhadap kemandirian fiskal juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sabono & Firmansyah (2024) tentang infrastruktur dan kemandirian daerah, yang menemukan bahwa infrastruktur sektor perumahan dan fasilitas umum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah melalui perluasan basis pajak dan peningkatan PAD, sedangkan infrastruktur sektor pariwisata berpengaruh negatif sehingga dalam konteks tertentu dampaknya bisa berbeda untuk setiap komponen infrastruktur (Sabono & Firmansyah, 2024). Penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda bahwa investasi infrastruktur berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal meskipun secara teori fiskal investasi

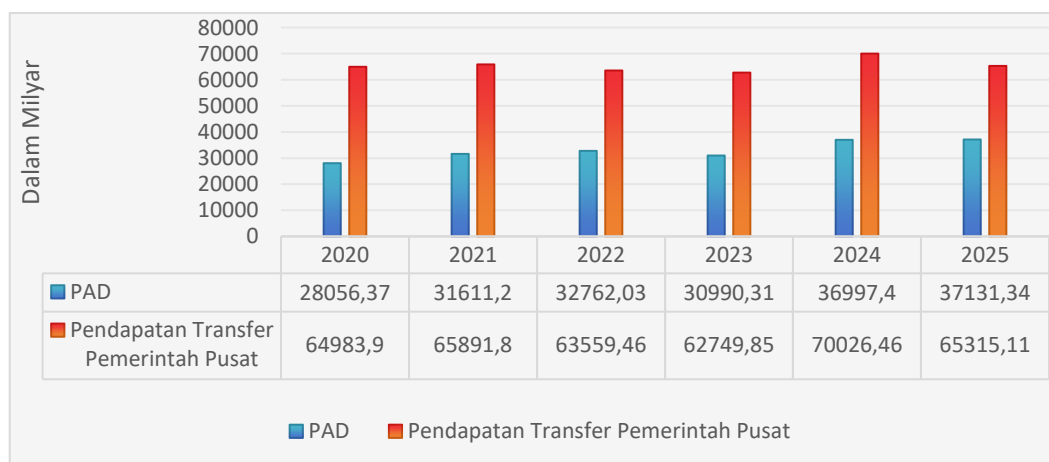
diharapkan memperkuat basis ekonomi lokal, sehingga pembangunan infrastruktur belum tentu langsung meningkatkan PAD dalam jangka pendek (Setianda et al., 2025).

Gambar 1.1 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2026).

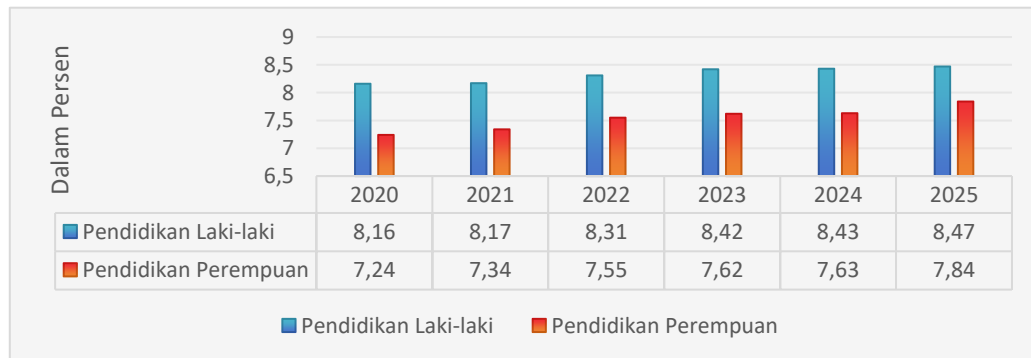
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk meningkat dari 36.516.035 jiwa pada tahun 2020 menjadi 38.233.900 jiwa pada tahun 2025. Peningkatan jumlah penduduk ini seharusnya menjadi potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, karena semakin besar jumlah penduduk maka semakin luas pula basis pajak dan aktivitas ekonomi yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Peningkatan jumlah penduduk yang signifikan tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah, sehingga menimbulkan indikasi bahwa potensi demografis belum dimanfaatkan secara optimal.

Gambar 1.2 Kemandirian Fiskal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2025

Sumber : Kementerian Keuangan (2026).

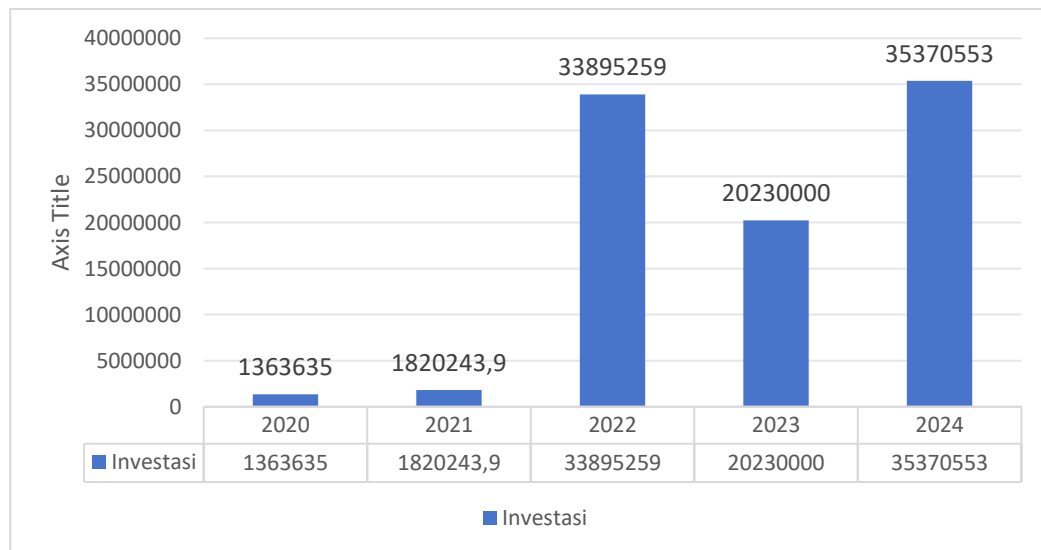
Permasalahan tersebut tercermin dari kondisi kemandirian fiskal daerah di Jawa Tengah yang masih relatif rendah. Berdasarkan data, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang mengalami peningkatan dari 28.056,37 pada tahun 2020 menjadi 37.131,34 pada tahun 2025. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, nilainya masih jauh lebih kecil. Pendapatan transfer bahkan konsisten berada di atas 60.000 setiap tahunnya dan mencapai 70.026,46 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer pusat, sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah belum optimal. Dengan kata lain, daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan.

**Gambar 1.3 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 - 2025**



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2026).

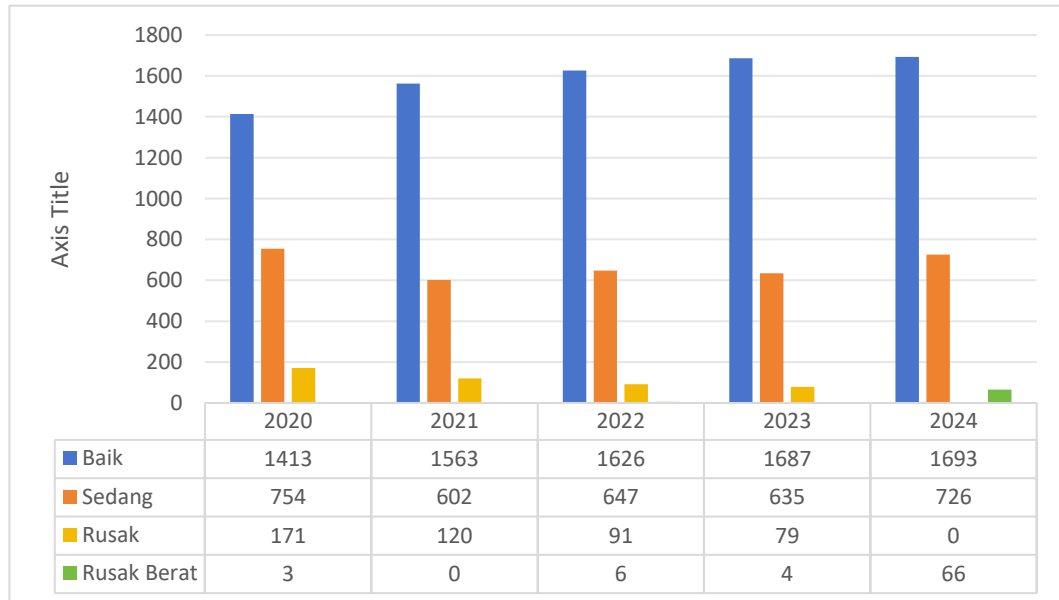
Variabel pendidikan, rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan, baik pada laki-laki maupun perempuan. Rata-rata lama sekolah laki-laki meningkat dari 8,16 tahun pada tahun 2020 menjadi 8,47 tahun pada tahun 2025, sedangkan perempuan meningkat dari 7,24 tahun menjadi 7,84 tahun. Meskipun mengalami peningkatan, angka tersebut masih tergolong rendah dan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat menengah pertama. Selain itu, peningkatan yang terjadi relatif lambat dan belum menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal ini menimbulkan indikasi bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada belum sepenuhnya mampu mendorong produktivitas ekonomi daerah secara optimal.

Gambar 1.4 Investasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2026).

Data investasi menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup tajam. Nilai investasi meningkat drastis dari 1.363.635,00 pada tahun 2020 menjadi 33.895.259,00 pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 20.230.000,00 pada tahun 2023, dan kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 35.370.553,00. Peningkatan investasi tersebut tidak diikuti dengan peningkatan PAD yang sejalan. Pada saat investasi masih berada pada tingkat yang tinggi, PAD justru mengalami penurunan pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk ke daerah belum sepenuhnya memberikan kontribusi langsung terhadap penerimaan daerah, sehingga mengindikasikan adanya ketidakefektifan dalam mengelola potensi investasi.

**Gambar 1.5 Panjang Jalan Provinsi Menurut Kondisi Jalan (km)
Provinsi Jawa Tengah**



Sumber : BPS Jawa Tengah (2025).

Pada aspek infrastruktur, kondisi jalan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam periode 2020–2024. Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa panjang jalan dengan kondisi baik cenderung meningkat dari 1.413 km pada tahun 2020 menjadi 1.693 km pada tahun 2024. Sementara itu, panjang jalan dalam kondisi rusak mengalami penurunan hingga mencapai 0 km pada tahun 2024. Namun demikian, terdapat peningkatan pada kategori jalan rusak berat yang mencapai 66 km pada tahun 2024, setelah sebelumnya relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum kualitas infrastruktur jalan mengalami perbaikan, masih terdapat ketimpangan dalam kualitas jalan yang dapat memengaruhi kelancaran distribusi barang dan jasa. Infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya merata tersebut berpotensi meningkatkan biaya logistik dan menurunkan efisiensi investasi, sehingga dapat memengaruhi optimalisasi PAD dan kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan kondisi empiris di Provinsi Jawa Tengah, terdapat kesenjangan antara potensi ekonomi daerah dan tingkat kemandirian fiskal yang dicapai. Meskipun jumlah penduduk terus meningkat, investasi mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, serta indikator pendidikan menunjukkan tren peningkatan, kondisi tersebut belum diikuti dengan peningkatan signifikan dalam kemandirian fiskal daerah. Struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri masih terbatas.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan kondisi empiris, di mana faktor-faktor yang secara teoritis mampu meningkatkan basis ekonomi daerah seperti pendidikan, investasi, dan infrastruktur, belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam efektivitas transformasi potensi ekonomi menjadi sumber penerimaan daerah.

Provinsi Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia serta memiliki dinamika ekonomi yang cukup kompleks, namun tingkat kemandirian fiskalnya masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadikan Jawa Tengah sebagai kasus yang relevan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendidikan, Investasi, dan Infrastruktur terhadap Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014–2024”.

1.2 Perumusan Masalah

Ditinjau dari permasalahan yang ada, penelitian ini memiliki rumusan masalah berikut:

1. Apakah pengaruh pendidikan, investasi, dan infrastruktur secara parsial terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014–2024?
2. Apakah pengaruh pendidikan, investasi dan infrastruktur secara simultan terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014–2024?
3. Variabel manakah yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Ditinjau dari rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan, investasi dan infrastruktur secara parsial terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014–2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan, investasi dan infrastruktur secara simultan terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014–2024.
3. Untuk mengetahui variabel manakah yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi publik dan ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai pengaruh pendidikan, investasi, dan infrastruktur terhadap kapasitas fiskal daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dengan objek atau periode yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan penguatan kemandirian fiskal.

b. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi dalam menyusun strategi pembangunan daerah yang menitikberatkan pada sektor pendidikan, investasi, dan infrastruktur.

c. Bagi Pemerintah Pusat

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merancang kebijakan transfer fiskal yang lebih efektif dan mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal daerah.

1.5 Batasan Permasalahan

Penelitian ini memerlukan fokus dan arah yang jelas agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka batasan permasalahan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh pendidikan, investasi, dan infrastruktur terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah tanpa memasukkan variabel lain di luar model penelitian.
2. Pengukuran variabel dilakukan dengan indikator tertentu, yaitu pendidikan menggunakan rata-rata lama sekolah, investasi menggunakan nilai realisasi investasi, infrastruktur menggunakan indikator pembangunan fisik, serta kemandirian fiskal diukur melalui rasio PAD terhadap total pendapatan daerah.
3. Penelitian dibatasi pada wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan periode tahun 2014–2024 menggunakan data sekunder dari instansi resmi.